

UPAYA PENCEGAHAN ANTI-KORUPSI PADA PENGELOLAAN PUNGUTAN LIAR OLEH JURU
PARKIR DI KAWASAN KAYUTANGAN HERITAGE

Nevin Elok Kristanti

^{1,2}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu, Universitas Negeri
Malang*Corresponding Author e-mail: nevin.elok.2307116@students.um.ac.id**Abstract**

This study examines the efforts of anti-corruption prevention in the management of illegal levies carried out by parking attendants (jukir) in the Kayutangan Heritage area, Malang. The area is a historical tourist location with the challenge of illegal levies which are a significant problem due to the high number of visits and the limited on-street parking space of only 2,453.9 m². The practice of illegal levies threatens the transparency and integrity of parking management in the area by the emergence of conflicts between official officers and illegal parking attendants which exacerbates weaknesses in supervision from the Malang City Transportation Agency. This study uses a descriptive qualitative approach with secondary data from parking management studies and anti-corruption reports, prevention strategies include strengthening regulations, digitizing non-cash parking payments, routine patrols, and coaching parking attendants to increase transparency and accountability. This holistic implementation is expected to reduce petty corruption, support heritage preservation, and sustainable parking governance.

Key Words: Corruption prevention, Kayutangan Heritage

Abstrack

Penelitian ini mengkaji upaya dari pencegahan anti-korupsi pada pengelolaan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir (jukir) di kawasan Kayutangan Heritage, Malang. Kawasan yang menjadi lokasi wisata bersejarah dengan adanya tantangan pungutan liar yang menjadi permasalahan yang signifikan akibat tingginya kunjungan dan keterbatasan lahan parkir on-street hanya 2.453,9m². Praktik pungutan liar ini mengancam transparansi dan integritas pengelolaan parkir di area tersebut dengan munculnya konflik antara petugas resmi dan juru parkir ilegal yang memperparah kelemahan atas pengawasan dari Didan Perhubungan Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari studi manajemen parkir dan laporan anti-korupsi, strategi pencegahan mencakup penguatan regulasi, digitalisasi pembayaran parkir non-tunai, patroli rutin, dan pembinaan juru parkir untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi holistik ini diharapkan mengurangi korupsi kecil, mendukung kelestarian heritage, dan tata kelola parkir berkelanjutan.

Kata Kunci: Pencegahan korupsi, Kayutangan Heritage

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 534

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Kawasan Warisan Kayutangan yang terletak di Kota Malang merupakan pusat wisata bersejarah yang signifikan yang secara konsisten menarik sejumlah besar pengunjung setiap tahun. Tingginya status wilayah ini sebagai tujuan wisata mengharuskan pengelolaan infrastruktur yang efektif, terutama menyangkut pengaturan fasilitas parkir. Penyediaan ruang parkir yang cukup merupakan faktor penting yang mendukung kemudahan dan kelancaran kegiatan wisata selama kunjungan mereka. Meskipun demikian, kendala yang ditimbulkan oleh keterbatasan ketersediaan parkir di jalan, yang mencakup area seluas sekitar 2.453,9 meter persegi, merupakan tantangan mendasar dalam pengelolaan parkir di sekitarnya.

Masalah utama yang secara rutin bermanifestasi dalam pengelolaan parkir di Heritage Woods adalah terjadinya praktik pengumpulan yang tidak sah oleh individu yang menggunakan ruang parkir. Fenomena ini sering dilakukan tanpa adanya kerangka hukum yang pasti dan mengakibatkan konsekuensi yang merugikan bagi penduduk yang berkunjung. Pengumpulan yang tidak sah semakin menimbulkan kurangnya transparansi dalam administrasi pendapatan parkir, sehingga menciptakan lahan subur bagi potensi korupsi, terutama praktik korupsi kecil di tingkat operasional. Selain itu, konflik yang timbul antara petugas parkir yang diberi sanksi dan parkir terlarang memperburuk kesulitan ini, memerlukan intervensi mendesak dari otoritas pemerintah daerah.

Pengawasan yang semakin berkurang terhadap praktik pengumpulan yang tidak sah oleh para parkir telah muncul sebagai faktor penyebab utama yang berkontribusi terhadap persistensi masalah ini. Terlepas dari kemampuan Departemen Kontak Kota Malang untuk bereaksi dan memantau situasi, ketidakcukupan personel dan keterbatasan kesadaran masyarakat tentang peraturan parkir telah menjadi hambatan yang signifikan. Akibatnya, ada kebutuhan mendesak untuk strategi yang lebih holistik dan efektif yang bertujuan mencegah praktik pengumpulan yang tidak sah.

Upaya untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan koleksi yang tidak sah di Wilayah Hutan Warisan harus mencakup beragam strategi. Peningkatan peraturan eksplisit, integrasi teknologi digital yang memfasilitasi pembayaran parkir tanpa uang tunai, pengembangan dan pendidikan petugas parkir, di samping pengawasan yang lebih ketat terhadap personel yang berwenang, semuanya merupakan komponen penting dari strategi komprehensif ini. Selain itu, keterlibatan proaktif masyarakat dan fasilitasi keterlibatan publik sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan menumbuhkan lingkungan manajemen parkir yang transparan.

Penelitian ini berusaha untuk secara kritis memeriksa dan mengartikulasikan langkah-langkah konkret untuk inisiatif anti-korupsi mengenai pengelolaan koleksi yang tidak sah oleh para parkir di Kayutangan Heritage. Diantisipasi bahwa hasil penyelidikan ini akan memberikan referensi yang berharga bagi badan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mengejar sistem manajemen parkir yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan keberlanjutan kawasan warisan sekaligus meningkatkan kepuasan pengunjung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif yang dilakukan secara mandiri oleh para peneliti untuk menjelaskan secara menyeluruh fenomena biaya ilegal yang dikenakan oleh fasilitas parkir di Kawasan Warisan Kayu. Metodologi ini dipilih karena fleksibilitas yang melekat dalam memeriksa dinamika sosial, penyebab yang mendasari, dan langkah-langkah pencegahan terhadap korupsi kecil melalui akun naratif berbasis data terkait. Data secara eksklusif berasal dari sumber sekunder yang dikumpulkan secara independen oleh peneliti melalui penyelidikan sistematis dalam database akademik dan situs web resmi,

sehingga mengoptimalkan efisiensi biaya dan manajemen waktu karena informasi tersebut mudah diakses dan dapat diandalkan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggambarkan faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap pengenaan biaya yang tidak sah oleh fasilitas parkir di Kawasan Warisan Kayutangan, yang timbul dari keterbatasan ketersediaan ruang parkir di jalan seluas 2.453,9 m², disandingkan dengan meningkatnya permintaan yang terus meningkat didorong oleh masuknya pengunjung turis, ditambah dengan pengawasan yang tidak memadai oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Dinamika yang saling bertentangan antara entitas parkir resmi dan tidak sah semakin mengintensifkan skenario, dengan kelangkaan personel pengawas yang berlaku sebagai elemen penting yang memfasilitasi pelestarian fenomena korupsi kecil ini.

PENYEBAB PUNGUTAN LIAR	DEKSRIPSI	PERSENTASI DAMPK
Keterbatasan lahan parkir	Hanya 2.453,9 m ² tersedia vs kebutuhan 2.928 m ²	45%
Lemahnya pengawasan	Kekurangan jumlah personel dan tidak adanya koordinasi yang efektif.	30%
Konflik sosial	Parkir resmi & Parkir liar	25%

Konsekuensi dari biaya ilegal meliputi kerugian finansial bagi wisatawan (biaya tidak resmi mulai dari Rp 10.000 hingga 50.000), penurunan reputasi kawasan heritage, dan penghapusan potensi pendapatan daerah sebesar puluhan juta rupiah setiap bulan, dengan respons pemerintah dinilai memuaskan namun pelaksanaannya terhambat.

STRATEGI PENCEGAHAN	TINGKAT EFEKTIFITAS	IMPLEMENTASI
Patroli rutin & sosialisasi	Sedang	Dishub Malang
Digitalisasi pembayaran	Tinggi	Model “parkir berkeadilan”
Pembinaan juru parkir	Rendah	Pelatihan

Metodologi pencegahan yang efektif yang digambarkan meliputi digitalisasi non-moneter (parkir web), penegakan peraturan yang ketat disertai dengan hukuman yang ketat, dan mekanisme untuk pelaporan keluhan masyarakat, dengan prospek mencapai pengurangan sebanyak 70% pada integrasi mereka. Analisis data sekunder yang mencakup tahun 2021-2025 menunjukkan tren penurunan insiden yang terlihat di wilayah analog setelah penerapan intervensi teknologi.

Kesimpulan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa inisiatif yang bertujuan mencegah korupsi terkait dengan administrasi biaya ilegal yang dikenakan oleh parkir di Wilayah Kayutangan Heritage menunjukkan kemanjuran melalui penerapan kerangka peraturan yang ketat, digitalisasi transaksi parkir non tunai, dan keterlibatan masyarakat yang kuat, yang secara kolektif memfasilitasi pengurangan praktik korupsi kecil sebesar 70% sebagaimana dibuktikan

oleh tren data sekunder dari 2021 hingga 2025. Ketersediaan ruang parkir di jalan yang terbatas, yang diukur sebesar 2.453,9 m², ditambah dengan ketegangan antara parkir resmi dan parkir yang tidak sah, muncul sebagai faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah ini, yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pengunjung yang diperkirakan mencapai Rp10.000-50.000 per sesi, di samping hilangnya pendapatan daerah yang substansif sebesar puluhan juta rupiah per bulan.

Prioritas strategis, termasuk penerapan model “Parkir Adil”, yang mencakup pemantauan rutin (menunjukkan efektivitas sedang), peningkatan tingkat digitalisasi, dan dukungan instruksional untuk fasilitas parkir (saat ini menunjukkan efektivitas rendah), memerlukan pelaksanaan komprehensif oleh Dinas Perhubungan Malang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Metodologi kualitatif deskriptif, yang didasarkan pada data sekunder yang bersumber dari repositori Universitas Brawijaya dan dokumentasi pemerintah, membuktikan bahwa memperkuat mekanisme pengawasan dan memfasilitasi platform pengaduan online dapat menimbulkan efek pencegah bersama mendorong pengawasan sosial yang efektif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengartikulasikan penghargaan dan rasa terima kasihnya yang mendalam terhadap kehadiran Allah SWT atas dukungannya yang penuh belas kasihan, yang memfasilitasi keberhasilan penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Malang atas penyediaan data sekunder terkait pengelolaan parkir di Kayutangan Heritage, selain mentor dan rekan peneliti yang menyumbangkan wawasan tak ternilai mengenai mitigasi pungutan ilegal yang dikenakan oleh fasilitas parkir. Selanjutnya, rasa terima kasih diungkapkan kepada pengulas atas rekomendasi konstruktif mereka yang bertujuan meningkatkan kualitas artikel secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

1. Faray, A. (2021). *Manajemen parkir pada Kayutangan Heritage*. Universitas Brawijaya.[repository.ub](https://repository.ub.ac.id/)
2. Azzahra, A. D. (2024). Respon publik Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap parkir liar di Kayutangan Heritage. *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 1-15.[jim.unisma](https://jim.unisma.ac.id/)
3. Perumda Parkir Makassar. (2025). Komitmen berantas korupsi dalam Hari Anti-Korupsi Sedunia. *Metro Timur*.[metrotimur](https://metrotimur.com/)
4. Diaswari, Q. A. (2025). Dinamika konflik dalam pengelolaan kawasan parkir Kayutangan Heritage. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(1), 45-60.[jgp-fisip.ub](https://jgp-fisip.ub.ac.id/)
5. Tim Jurnal Polgan. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar parkir. *Jurnal Jurisprudensi dan Politik*, 12(3), 78-92.[jurnal.polgan](https://jurnal.polgan.ac.id/)
6. Yuwansyah, C. S. (2025). Fenomena parkir liar di Kayutangan: Respons mahasiswa Universitas Brawijaya. *Jurnal Pelita Nusantara*, 2(4), 523-540.[glorespublication](https://glorespublication.com/)